

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-1004 telah dinyatakan bahwa tidak boleh ada ketergantungan kepada Luar Negeri untuk ketersediaan beras, karena hal ini akan merupakan ancaman terhadap Ketahanan Nasional. Dengan adanya tantangan ini keharusan untuk harus tetap swasembada beras tanpa impor maka solusi yang paling cepat adalah perbaikan dan pengembangan bidang pertanian.

Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dikelilingi oleh dua pegunungan yaitu Bukit Barisan dan Gunung Leuser yang memanjang dari Utara dan Selatan dengan luas wilayah 423.141 Ha yang didalamnya sudah termasuk luas lahan pertanian 33.462 Ha (7,91 %), sehingga upaya pengembangan lahan sudah tidak memungkinkan lagi karena dibatasi oleh adanya kawasan Gunung Leuser sebagai kawasan Taman Nasional yang harus dilindungi, adapun upaya yang memungkinkan adalah kegiatan Intensifikasi. (Aceh Tenggara Dalam Angka, 2000).

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Kabupaten Aceh Tenggara. Menurut data yang tersedia, bahwa luas lahan sawah yang berada di

Daerah Aceh Tenggara seluas 17.224 ha, dengan luas lahan yang telah mempunyai irigasi pedesaan 12.500 ha sedangkan sisanya 4.500 ha tadah hujan.

Potensi sektor pertanian ini membawa Kabupaten Aceh Tenggara mencapai swasembada beras nasional pada tahun 1984 dan pada tahun 1987. Namun dalam perkembangan selanjutnya kondisi swasembada ini tidak dapat dipertahankan. Memperhatikan kenyataan ini maka langkah yang diambil pemerintah daerah diantaranya adalah dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan guna menjamin kemandirian dan kelestarian swasembada pangan dalam jangka panjang. Kebijaksanaan tersebut antara lain mengatur penyerahan beban pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kepada petani baik secara langsung melalui penyerahan pengelolaan jaringan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) maupun secara tidak langsung melalui penganan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) dan direncanakan ditetapkan secara berangsur pada seluruh jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah sampai dengan tahun 2007.

Namun sampai dengan tahun 1997 hingga sekarang, kebijakan di atas masih sangat jauh dari sasaran yang direncanakan, hal ini disebabkan rendahnya daya dukung atau partisipasi masyarakat tani akan keberlangsungan program ini, disamping masih rendahnya unjuk kerja petugas penyuluh lapangan serta keinginan masyarakat tani melalui kelompok tani yang ada mengikuti segala anjuran dan penyuluhan dari petugas lapangan pertanian.

Manakala hal ini tidak sesegera mungkin dilakukan antisipasi secara dini maka dapat diprediksi bahwa upaya pengembangan dan peningkatan hasil produksi padi atau beras di daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan seperti yang dicapai sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, berikut akan diteliti hubungan antara komunikasi interpersonal dan pemahaman tujuan penyuluhan dengan kinerja petugas penyuluhan pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sehubungan dengan peningkatan kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan di antaranya adalah : (1) latar belakang pendidikan, (2) kemampuan komunikasi interpersonal petugas penyuluh cenderung lemah, (3) pemahaman tujuan penyuluhan, (4) disiplin kerja petugas penyuluhan yang nampaknya masih rendah, (5) sarana dan prasarana pendukung kurang memadai, (6) iklim kelompok tani yang cenderung kurang kondusif, (7) anjuran atau penyuluhan dari petugas nampaknya masih kurang diperhatikan, dan seabrek persoalan lainnya.

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan untuk melakukan penelitian terhadap semua faktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja petugas penyuluhan pertanian lapangan maka perlu dibatasi masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini permasalahannya dibatasi dalam hal kemampuan komunikasi interpersonal petugas penyuluh lapangan (PPL) dan pemahaman tujuan penyuluhan.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Adakah hubungan yang signifikan kemampuan komunikasi interpersonal dengan kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Adakah hubungan yang signifikan pemahaman tujuan penyuluhan dengan kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Adakah hubungan yang signifikan kemampuan komunikasi interpersonal dan pemahaman tujuan penyuluhan secara bersama-sama dengan kinerja petugas penyulu pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara?

## E . Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan hubungan antara kemampuan komunikasi interpersonal dengan kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Mengungkapkan hubungan pemahaman tujuan penyuluhan dengan kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Mengungkapkan hubungan kemampuan komunikasi interpersonal dan pemahaman tujuan penyuluhan secara bersama-sama dengan kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Tenggara.

## F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Sebagai masukan untuk bahan penilaian bagi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara mengenai kinerja para petugas lapangan penyuluh pertanian untuk ditingkatkan lebih baik pada masa akan datang.
2. Sebagai masukan bagi para petugas lapangan penyuluh pertanian dalam rangka memperbaiki kinerja penyuluhan pertaniannya sehingga dapat meningkatkan keberhasilan peningkatan produksi tani di Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Secara konseptual hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam upaya memahami secara lebih jauh tentang fenomena penyuluhan pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara.

